

# **MENUJU ETIKA PENDIDIKAN KESETARAAN: Membendung Bias Gender, Mencari Perspektif Humanis**

*Achmad Fawaid\**

## **Abstract**

Since last decades gender issue has been a debatable issue in Indonesia, particularly in the field of education. Men generally have access to all stages or levels of education, while women are mostly left behind. Gender equality has been declared nowadays. Women, however, are still discriminated in the field of education. This article offers some important alternatives to solve the problem of gender inequality in education. One of important strategies to deal with the problem is developing an inclusive educational system. This model of education includes six steps: first, revising the language and content of text books which have gender bias; second, encouraging female students to express their cultural differences; third, giving opportunity to female students to be able to access to and participate in all programs and departments in every educational stages, especially the programs that generally are dominated by male students, by developing a new student recruitment system that considers gender balance; fourth, integrating gender equality paradigm in every subject matter and increasing the gender awareness of both teachers and students; fifth, developing extra programs periodically and giving the women an opportunity to be the leader of the program; sixth, making gender balance between the number of male and female teachers and giving them same access and participation in the process of decision making. The strategy, nevertheless, is not enough merely by transforming the educational system and program. The paradigm, more over, has also to be changed. Thus, the writer proposes what so-call humanity educational paradigm; the

---

\* Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

*educational system which not only rejects gender inequality, but also makes an effort to eliminate all kinds of humanity based-discrimination and exploitation. The strategy focuses primarily on the empowerment of students. It includes three important parts: power-to, power-with, and power within. By employing this strategy, education will become the most effective medium to eradicate all gender inequality problems and, at the same time, create equality for both women and men in education.*

## **Kata Kunci : Gender, Equality, Pendidikan**

### **I. Pendahuluan**

Sejarah telah menunjukkan betapa dalam beberapa dasawarsa terakhir masyarakat modern tengah dilanda hegemoni pemikiran dan sindroma akut bernama ketimpangan yang membabi buta. Ketimpangan tersebut bukan sekedar kegagalan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya, tapi lebih pada ketimpangan aspek personal. Sejak zaman dahulu ketimpangan tersebut diwarnai dengan berbagai macam eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan hanya diberi tempat di ranah domestik dan tidak mendapat akses ke ruang publik.<sup>1</sup> Sedangkan laki-laki selalu dominan menggerogoti lapangan kerja yang ada dalam struktur kehidupan masyarakat. Akibatnya, ideologi patriarkal menjadi fenomena

---

<sup>1</sup> Dalam perspektif Berger, kenyataan ini merupakan gejala awal dari runtuhnya posisi perempuan dalam *primary job*. Hal ini lah, kata Berger, yang menyebabkan terbentuknya perbedaan peranan antara perempuan dan laki-laki, di mana kekuasaan perempuan selalu berada dalam rumah (domestik) dan laki-laki di luar rumah (publik). Berger kemudian memberikan gambaran teoritis tentang latar belakang terjadinya kesenjangan ini: *pertama*, konstruksi sosial, yang menerangkan bagaimana proses awal bidang domestik dan bidang publik itu terbentuk. *Kedua*, reproduksi sosial, yaitu bagaimana perbedaan bidang domestik dan publik itu. Lih. Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, (London: Penguin Press BPS, 1976), 134. Bahkan, teori segmentasi pasar tenaga kerja mengatakan bahwa laki-laki sejak awal telah terkonsentrasi dalam pekerjaan berupah tinggi dan stabil dengan prospek karir yang lebih baik, yang sering diistilahkan dengan *primary job*. Sedangkan *secondary jobs*, yang lebih banyak diduduki oleh perempuan, tidak menjanjikan jaminan akan kestabilan kerja dan kompensasi rendah tanpa prospek untuk berkembang di masa depan. Lih. Chiplin and Sloane, *Trackling discrimination at the Workplace: an Analysis of Sex Discrimination in Britian*, (London: Cambridge University Press, 1982), 36

tak terbantahkan dalam masyarakat dan segera mengakar dalam segala bidang, baik dalam ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Semakin perempuan menyadari identitas dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat maka jaringan ideologi tersebut semakin mengikat dan menutup diri dari perempuan. Caranya, dengan melegalkan bahasa patriarkal dalam segala hal, terutama lewat ilmu pengetahuan dan jalur pendidikan.

J.J. Reusseau, filsuf kenamaan asal Perancis, mengawali lahirnya konsep patriarki melalui novel fenomenalnya, *Emile*. Dalam novel tersebut, Reusseau seakan ingin meneguhkan asumsi bahwa perempuan tidak mungkin memperoleh posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan diandaikan sebagai *the second person* yang hanya bergulat dan bermain dalam ruang lingkup yang terbatas dan primordialistik. Konsep patriarki, sebagaimana diungkap secara implisit dalam novel Reusseau, menggambarkan sebuah parodi; betapa sulit menerima persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah pendidikan. Menurut Reusseau, perempuan harus memperoleh pembelajaran tentang masa depan derja mereka sebagai ibu rumah tangga yang baik. Perempuan juga harus dibekali dengan pendidikan yang berusaha menaruhnya setara dengan laki-laki, seperti musik, tari, sastra, dan keterampilan rumah tangga. Bidang-bidang yang tergolong berat, seperti hukum, politik, dan filsafat memang bukan suatu yang cocok bagi perempuan yang terlalu serius memburu kesetaraan dengan laki-laki. Bahkan, dengan sinis, Reusseau menyebut kompleksitas biologis sebagai salah satu alasan adanya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Dari sinilah, konsep subordinasi dan patriarki menjadi akar tumbuhnya ketimpangan gender dalam tubuh lembaga pendidikan. Novel yang berkarakter misioginis ini pula seakan berusaha menelanjangi posisi perempuan dalam segala lini kehidupan manusia. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai manusia utuh, melainkan mereka terpinggirkan dengan

---

<sup>2</sup> Penjelasan tentang novel Reusseau ini pernah ditulis oleh Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, (Australia: Allen & Unwin, 1998), 13

istilah submanusia (*sub-human*).<sup>3</sup> Apa yang tergambar dalam novel ini jelas merupakan pembabatan total terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan dalam ranah pendidikan. Padahal, pendidikan lebih sering dikenal dengan jargon *for all*, *pedagogy*, dan *liberation*-nya yang seolah ingin menampik segala ketidakadilan yang mengatasnamakan humanisme.

Usaha penolakan terhadap konsep Reusseau yang tertuang dalam novelnya dilakukan oleh salah seorang feminis, Mary Wollstonescraft, dalam *Vindication of The Rights of Women* (1789). Wollstonescraft berusaha memutarbalikkan pandangan Reusseau tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam ranah pendidikan. Jika Reusseau memakai istilah dengimbangi yang menjadi tugas perempuan terhadap laki-laki, maka Wollstonescraft lebih memilih kata denguasai. Artinya, perempuan seharusnya memiliki hak pendidikan yang sama dalam rangka mengalahkan dominasi laki-laki di segala level. Bahkan, Wollstonescraft mengkritik pandangan Reusseau dengan asumsi bahwa bagaimana mungkin seorang perempuan dapat mengimbangi jika dia tidak mengerti sama sekali pada pembicaraan laki-laki. Yang terjadi justru perempuan akan mengalami ketertekanan sebab ketidakpahamannya tersebut. Wollstonescraft kemudian menganalogkan seorang perempuan yang hanya akan menjadi pendengar setia di saat sang suami mengeluh tentang pekerjaan kantor atau isu yang sedang terjadi di masyarakat karena dia tidak mampu memahami. Sang istri pada akhirnya menjadi tersubordinasi sebab kejadian tersebut. Dengan demikian, Wollstonescraft mendasari pandangannya dengan hipotesis bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam ranah pendidikan agar dapat berpartisipasi dalam ruang publik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Aristoteles menyebut *subhuman* sebagai “manusia” yang berada di bawah manusia. Manusia dengan tanda kutip (“) merupakan gambaran tentang makhluk yang berada di luar negara, sebagaimana manusia-manusia lain. Eksistensinya selalu tak jauh berbeda dengan hewan. Itulah yang ingin disampaikan Aristoteles untuk meletakkan *politikon zoom* sebagai idenitas “paling” buruk yang mendeskripsikan manusia sebagai makhluk-makhluk sejenis hewan yang hidup dalam *polis* (negara kota). Lihat selengkapnya dalam Dr. JH Rapar, Th.D., Ph.D., *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 43

<sup>4</sup> Rosemarie Putnam Tong, *Feminist ...*, 20

Lalu, apakah benar untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan melalui pendidikan yang sama untuk semua? Bukankah pendidikan selama ini juga cenderung menjadikan perempuan sebagai objek ketidakadilan gender dalam ranah pembelajaran?

Sederet pertanyaan inilah yang mengilhami penulis untuk menyelidiki paradigma ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam ranah pendidikan. Karya tulis ini ingin mengungkap fakta tersebut dan melakukan problematisasi dalam rangka menemukan titik sentrum pemecahan bagi keberlangsungan budaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penulis mengawali karya tulis ini dengan pembahasan tentang isu-isu gender dalam wilayah pendidikan yang berkembang di nusantara, kemudian membongkar kembali paradigma yang keliru tentang pemerataan pendidikan sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan sindroma *gender inequalities*. Terakhir, penulis memberikan semacam hipotesis dan langkah teoritik-aplikatif tentang model pendidikan yang mampu menghapus ketidakadilan terhadap perempuan selama ini.

## II. Gender di Indonesia: Fragmen Kegelisahan Sejarah

Sejalan dengan perkembangan zaman, Indonesia menjadi salah satu negara yang sarat dengan berbagai macam ketimpangan gender, mulai dari level ekonomi hingga level budaya. Salah satu problem yang sempat menjadi isu paling mutakhir di bumi pertiwi adalah masalah poligami.<sup>5</sup> Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya tidak

---

<sup>5</sup> Ada beberapa tafsir agama yang selalu dipolitisir oleh masyarakat patriarki untuk menampakkan konsep ketidakadilan gender dalam masalah poligami ini. Salah satunya adalah surat Annisa, ayat 3 dan 129, yang masing-masing diterjemahkan sebagai berikut: “..Menikahlah dengan perempuan pilihanmu dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka hanya satu” (QS. Annisa: 3). Sehingga banyak laki-laki menikah hingga lima kali dan tentu saja pihak laki-laki senantiasa menganggap dirinya sudah adil tanpa mengindahkan ayat yang relevan yang lain: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian” (QS. Annisa: 129). Di Indonesia, kasus poligami ini diwarnai dengan merebaknya isu kontroversial tentang pernikahan kedua Abdullah Gymnastiar, salah satu da'i paling populer tahun 2005-an.

bisa menolak kehadiran poligami sebagai sesuatu yang final di tangan para ulama klasik. Hal ini lantaran poligami merupakan salah satu masalah yang tak kunjung usai diproblematikasi oleh pemerhati agama Islam di Indonesia. Kajian mereka tentang poligami tentunya menyangkut masalah-masalah kedudukan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam perspektif keadilan gender.

Sepanjang kajiannya, mereka kemudian sampai pada kesimpulan bahwa poligami merupakan kasus religius yang bias gender. Poligami, dalam pandangan mereka, adalah salah satu bentuk pelecehan dan eksploitasi terhadap perempuan dengan mengatasnamakan agama. Artinya, suami yang beristri lebih dari satu tidak mungkin melepaskan diri dari subjektivitas *an-sich*. Semakin kita mengandalkan subjektivitas sebagai salah satu dimensi diri dalam berkeluarga, maka keadilan sebagai prasyarat mutlak dalam poligami akan semakin terlupakan.

Apa yang kini disebut dengan *gender inequalities*<sup>6</sup> adalah salah satu geliat paling menonjol dari problem ini. Isu tersebut menjelma phobia akut dan ancaman keras terhadap perempuan di nusantara, bahwa laki-laki akan selalu memiliki kekuasaan yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih tinggi dari perempuan. Laki-laki dalam hal ini diandaikan sebagai sosok manusia yang memiliki totalitas agung dan menjadikan gagasan mereka sesuatu yang universal, yang harus diikuti oleh seluruh perempuan.

Pada sejarah Indonesia, kita menemukan Jawa yang begitu kental budaya feodalisme dan patriarkisme. Dalam tradisi Jawa, perempuan harus mempunyai sifat-sifat yang ideal dalam bersikap, berpenampilan, dan

---

<sup>6</sup> Istilah ini dipopulerkan oleh J.S. Chafetz, "The Gender Division of Labor and The Reproduction of Female Disadvantage: Toward an Integrated Theory," dalam R.L. Blumberg (ed.), *Gender, Family, and Economy: The Triple Overlap*, (Newbury Park: Sage Publication, 1991), 162. Yang perlu dicatat bahwa *gender inequalities*, menurut Chafetz, mengacu pada ketidakseimbangan akses sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber-sumber yang penting itu meliputi kekuasaan barang-barang material dan jasa yang diberikan orang lain, prestise, perawatan medis, otonomi pribadi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik. Ironisnya, sumber-sumber tersebut lebih banyak dimiliki dan dirasakan oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya mendapat bagian dari sisa-sisa kekuasaan subordinasi mereka.

bertingkah laku. Selama ini masih banyak ditemukan identitas *driyai* dan *dribumi* yang selalu bersifat patriarkal. Di mana, laki-laki lebih sering berperan dominan dalam kehidupan sosial yang strategis. Sedangkan perempuan sama sekali tidak mempunyai *bargaining position* yang memadai untuk bergiat dalam tatanan kehidupan yang serupa. Dominasi tersebut dapat ditemukan dalam beberapa aspek, seperti bio-sosial, sosio-kultural, politik, dan religius. Akibatnya, sebagaimana lazimnya kodrat sebuah kekuasaan, dominasi terhadap seluruh aspek kehidupan menyebabkan laki-laki seringkali bersikap otoriter. Salah satu bentuk otoritarinisme yang begitu kental dalam diri laki-laki dapat dilihat pada larangan-larangan mereka (suami) terhadap istri. Sejarah telah menunjukkan bahwa dalam tradisi Jawa, istri pejabat tidak boleh keluar rumah pada saat suami tidak ada di rumah, istri harus berbusana rapi, bersih, berwajah cerah, dan tidak boleh mengeluh jika suaminya mengambil selir.<sup>7</sup> *Anak lanang mikul dhuwur mendhem jero* pada akhirnya menjadi istilah yang mengakar dalam tradisi Jawa. Ironisnya, istilah berbias gender itu hingga saat ini masih diajarkan secara hirarkis dan turun menurun dengan dampak yang bisa ditebak: tumbuhnya benih-benih dikotomi antara laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Dari sini pula, timbullah dominasi bahasa terhadap perkembangan gender di Indonesia. Setidaknya, bahasa banyak berperan penting dalam memposisikan gender di tengah-tengah masyarakat. Istilah *anak lanang mikul dhuwur mendhem jero* di atas jelas merefleksikan pengaruh bahasa terhadap realitas gender yang sarat dengan berbagai eksploitasi, baik tindakan maupun lisan. Lisan, dengan demikian, adalah medium bahasa yang sering berurusan langsung dengan tanda. Dalam hal ini, Saussure, seorang filsuf yang meletakkan dasar-dasar ilmu linguistik, mengatakan bahwa tanda dalam bahasa merupakan kombinasi konsep dan gambaran

---

<sup>7</sup> Suyatno Kartodirjo, *Wanita dalam Kebudayaan Priyayi: Kajian Sejarah Gender*. Makalah Simposium Internasional Ilmu-ilmu Humaniora di Yogyakarta. Makalah tidak dipublikasikan, 1998, 3

<sup>8</sup> Riboet Darmosoetopo, *Ideologi Gender dalam Perubahan Sosial*. Makalah Simposium Internasional Ilmu-ilmu Humaniora di Yogyakarta. Makalah tidak dipublikasikan, 1998, 2

akustis. Sebagai tanda, bahasa tidak bisa lepas dari penanda dan titanda. Keduanya membantu bahasa untuk melakukan klasifikasi dan penandaan terhadap benda-benda. Usaha penandaan dan pengklasifikasian ini merupakan dua langkah terpenting dalam teori linguistik untuk menentukan benda dalam bidang-bidang katagori.<sup>9</sup> Goddard dan Patterson, adalah dua pakar linguistik yang membagi katagori tersebut dengan istilah dormal dan denyimpang. Keduanya merupakan istilah konkrit dari teori pemarkahan yang terbagi menjadi pemarkahan terbuka dan pemarkahan tertutup.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan fenomenal ini, kedua istilah di atas selalu menyiratkan perbedaan dan dikotomi antara satu benda dengan yang lain. Ucapan drang normal dan drang menyimpang adalah contoh dari usaha membedakan manusia sesuai dengan sifat dan perilaku. Sedangkan dalam wacana gender, istilah tersebut lebih kasat mata. Pengaruh tradisi dan budaya setempat seringkali melahirkan bahasa dan istilah yang berusaha membedakan perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam masalah jenis kelamin (seks), tapi juga kodrat dan posisi mereka dalam struktur kehidupan manusia. Sufiks *wati* pada kata *wartawati* dan *karyawati*, misalnya, adalah tanda bahasa yang tertutup untuk menunjuk kepada perempuan. Kata-kata tersebut diturunkan dari *wartawan* dan *karyawan*, yang bersifat lebih terbuka, mencakup laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, ada pelecehan linguistik-metodologis yang sengaja mempersempit posisi perempuan dengan cara menciptakan bahasa turunan dari laki-laki.

Hendarto Supatra dan Mujib F. Amin adalah dua orang pemerhati gender yang meneliti kehidupan masyarakat Jawa melalui bahasa-nya. Sepanjang penelitiannya, mereka berasumsi bahwa kehidupan masyarakat Jawa ternyata banyak diwarnai dengan berbagai macam ketimpangan gender dalam hal bahasa. Mereka membuktikan hal itu dengan mengkontraskan antara kata lanang dan wadon. Supatra dan Amin menya-

---

<sup>9</sup> Ferdinand de Saussure, *Pengantar Linguistik Umum*, Penerjemah: Tim Penerjemah UGM Yogyakarta (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 68

<sup>10</sup> Angela Goddard dan Lindsey Mean Petterson, *Language and Gender* (London and New York: Routledge, 2000), 85



takan bahwa: (1) laki-laki dibentuk menjadi superior, (2) perempuan dicirikan banyak bicara, (3) hanya laki-laki yang diperhitungkan dan (4) adanya patrialkalitas pada masyarakat Jawa. Tes pertama dibuktikan dengan tidak bisa disubstitusikannya kata *lanang* dengan kata *wadon* pada kalimat *lanang iku tegese ala menang* (laki-laki itu meskipun jelek tetap menang) dan *cah lanang kuwi kudu bandel* (anak laki-laki itu harus pemberani/tahan banting). Proposisi kedua dibuktikan dengan tidak tergantikannya kata *lanang* dalam kalimat *wong lanang kok criwise ora karuan* (orang laki-laki kok criwis-nya bukan main) dan ketidakmungkinannya kata *wadon* diganti dengan kata *lanang* dalam kalimat dasar *wong wadon nek guneman cangkeme loro maju kabeh* (dasar perempuan kalau bicara dua mulut maju semua). Pernyataan ketiga dibuktikan dengan lima macam pantangan yang harus di jauhi laki-laki dan lima macam kriteria keberhasilan seseorang. Lima macam pantangan yaitu *mulima*, yakni: *main* (berjudi), *madat* (minum candu/ganja), *maling* (mencuri), *minum* (minuman keras), dan *madon* (melacur). Lima macam kriteria yang dimaksud adalah: *curigu* (keris: gelar, pangkat, kedudukan), *wisma* (rumah), *turangga* (kendaraan), *kukila* (burung piaraan: TV, radio), *wanita/wong wadon*. Fenomena keempat dibuktikan dengan ungkapan masyarakat Jawa *wong wadon iku swarga nunut neraka katut* (wanita itu surga numpang suami dan jika suami ke neraka terbawa).<sup>11</sup>

Realitas ketimpangan gender di atas adalah kegelisahan budaya. Juga, kegelisahan sejarah masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya masyarakat Jawa. Di mana, penduduk Jawa yang sangat memperhatikan bahasa sebagai etika sehari-hari ternyata masih terperangkap pada dikotomi yang cukup paradoksal. Dari sinilah muncul berbagai macam ketimpangan-ketimpangan gender di semua ranah kehidupan. Pengaruh bahasa menjalar, memasuki ruang-ruang dialogis antara laki-laki dan perempuan. Bahasa kemudian menjelma ancaman keras terhadap perem-

---

<sup>11</sup> Penelitian Hendarto Supatra dan Mujid F. Amin dapat dilihat dalam "Analisis Kontrastif Kata Lanang dan Wadon: Suatu Kajian Sosiosemantik untuk Mengungkap Status Wanita Jawa," dalam *Lembaran Sastra* (No. 20 tahun, 1996), 39.

puan yang seringkali terdesak oleh istilah-istilah kebahasaan yang tak lagi mendukungnya.

### III. Pendidikan dan Problem Kebahasaan

Teori postrukturalisme dan posmodernisme adalah salah satu teori feminisme yang gencar mengkritik pendidikan sebagai lahan paling subur tumbuhnya ketidakadilan gender. Teori ini mengkritik definisi pendidikan yang lebih berpusat pada laki-laki (*male-centered*) yang nyaris tidak dipertanyakan lagi atau sudah dianggap wajar dan semestinya. Teori ini juga membongkar semua anggapan-anggapan yang diterima begitu saja. Konsentrasi yang dilakukan teori ini adalah melihat semua diskursus-diskursus (baca: teks-teks) yang ada dalam dunia pendidikan yang melakukan operasi bawah sadar sehingga terjadi penaturalan bahasa-bahasa yang bias gender. Oleh sebab itu, teori ini bukan saja mengajak mereka yang berkepentingan dengan pendidikan untuk merubah kurikulum tetapi melihat bagaimana kurikulum bias gender terbentuk dan beroperasi secara luas.<sup>12</sup> Dengan demikian, teori ini ingin menunjukkan bahwa pendidikan mengambil peran signifikan dalam memperkuat anggapan dan stigma negatif terhadap kedudukan perempuan melalui pemyarakatan bahasa.

Kenyataan ini lah yang nampaknya menjadi sindroma akut yang menggejala dalam wilayah pendidikan nasional, seperti tergambar dalam sistem pembelajarannya yang cenderung menggunakan bahasa teks (buku) sebagai satu-satunya media belajar siswa. Sebagaimana diketahui, Indonesia begitu ōcerhutang budi pada pola pembelajaran masyarakat kolonial Belanda. Pada saat itu, pengaruh bahasa Belanda dan bahasa negara-negara lain begitu berperan penting dalam pembentukan bahasa Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> R. Collins, "Women and Men in The Class Structure," dalam Blumberg (ed.), 85

<sup>13</sup> Kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda sekitar 3.280 kata. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar dari bahasa-bahasa asing yang menjadi awal munculnya bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Selain bahasa Belanda, ada juga

Ironisnya, bahasa Indonesia seringkali disalahgunakan oleh para penggunanya, khususnya lembaga pendidikan yang berkepentingan melakukan sosialisasi bahasa Indonesia melalui buku pelajaran kepada peserta didik. Pendidikan seringkali menafsirkan bahasa tidak lebih sebagai media komunikasi saja, tanpa mau memperhatikan akibat pemakaian dari pembentukan bahasa itu sendiri. Buku-buku pelajaran tanpa disadari banyak menggunakan contoh-contoh bahasa yang menyudutkan posisi perempuan. Hal ini menyebabkan ilmu pengetahuan yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan lebih banyak dikuasai oleh bentuk pengetahuan dan bahasa positivistik.

Konsep pengetahuan semacam ini pada gilirannya akan membentuk pola pemikiran yang terfokus pada ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik *an-sich*, mengarah pada pengobjekan pengetahuan. Pengetahuan secara tidak langsung telah melegalkan usaha dikotomisasi untuk menilai sesuatu. Efek dari pola pengetahuan ini terlihat saat peserta didik masuk dalam masyarakat. Segalanya dipandangan pada skala ekstrem: *benar-salah; hitam-putih; perempuan-laki-laki*. Bahasa pun terdikotomi semacam itu, sehingga dalam bentuk budaya, nilai-nilai dalam masyarakat ataupun hukum yang berlaku tidak lagi memandang manusia sebagai subjek, tapi lebih melihat manusia sebagai objek untuk dianalisis. Keberadaan bahasa benar-benar derkucilkan oleh tradisi pendidikan nasional yang selalu memegang teguh pola pengetahuan positivistik.

Dalam kasus gender, diskursus mengenai bahasa ini semakin memojokkan posisi perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Jika bahasa mengalami dikotomi sedemikian parah, maka perempuan akan tereliminasi dari struktur kehidupan manusia, terutama dalam komunitas kaum laki-laki. Hal ini disebabkan para pelaku dalam masyarakat adalah laki-laki, perempuan hanya menempati objek bahasa laki-laki. Perempuan tidak memiliki kesempatan untuk membahasakan pengalamannya karena telah dipaksa untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Perempuan akhirnya harus mengakui bahwa dirinya secara tidak langsung telah terkalahkan oleh kedudukan laki-laki. Akibatnya, perempuan selalu

dituntut untuk mengikuti segala peraturan tentang diri mereka, termasuk menentukan tubuh dan identitasnya.

Fenomena ini pada kenyataannya memang berujung pada fakta bahwa pendidikan di Indonesia masih bias gender. Membaca buku-buku pelajaran sekolah-sekolah formal dan non formal akan banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak menunjukkan kesetaraan gender. Tengoklah misalnya, saat peserta didik yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar harus diajarkan bagaimana melihat contoh gambar seorang pilot yang berjenis kelamin laki-laki dan para karyawan dan bos kantor selalu berwajah laki-laki. Hal tersebut disebabkan pekerjaan semacam itu memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Peserta didik benar-benar digiring untuk tidak menghargai kedudukan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rumusan kalimat pun juga seringkali ditemukan bahasa-bahasa yang bias gender. Contoh kalimat *Ĥni ibu Budi*, bukan *Ĥni ibu Santi* selalu diajarkan kepada peserta didik sejak kanak-kanak. Begitu juga dengan perumpamaan *Ĥyah membaca koran* dan *Ibu memasak di dapur* dan bukan sebaliknya *Ĥyah memasak di dapur* dan *Ibu membaca koran* merupakan salah satu contoh dari sekian banyak aspek pengajaran yang diinformasikan kepada mereka secara intensif. Perempuan pada akhirnya harus mengakui kekalahannya dalam dunia pendidikan karena sejak kanak-kanak, di mana masa ini merupakan saat paling strategis untuk menumbuhkan karakter dan kepribadian seseorang, mereka sudah diajarkan untuk mematuhi peraturan yang nyaris diwarnai dengan bias ketidakadilan gender.

Kalimat-kalimat dalam buku pelajaran sebagaimana dicontohkan di atas sebenarnya adalah pintu awal untuk menanamkan pembelajaran berbias gender yang lebih parah dan sistemik kepada peserta didik. Problem kebahasaan dalam dunia pendidikan justru juga ditampakkan oleh para guru. Misalnya, saat guru melihat anak didik laki-lakinya menangis, maka dia akan mengatakan *×casa' laki-laki* menangis. Laki-laki tidak boleh cengeng. Sebaliknya, saat guru tersebut melihat anak didik perempuannya naik ke atas meja, dia berkata *Ĥnak perempuan* kok tidak

tahu sopan santun. Dari seruan tersebut dapat diambil *mafhum mukhalafah*-nya bahwa hanya perempuan lah yang boleh menangis dan laki-laki boleh kasar dan tidak sopan santun.

Bahasa kemudian menjadi bagian primer untuk menuju ruang-ruang kebebasan mengeksploitasi harkat dan martabat perempuan. Melalui bahasa, pendidikan secara tidak langsung telah memperparah tradisi ketidakadilan gender dalam kehidupan umat manusia. Pendidikan memanfaatkan bahasa sebagai media eksploitasi atas nama ilmu pengetahuan dan menafikan dampak jangka panjang yang akan lahir dari bahasa-bahasa tersebut. Dengan mempermainkan bahasa sebagai objek ilmu pengetahuan, perempuan pada akhirnya menjadi manusia yang tak bisa berbuat apa-apa, kecuali menuruti maksud dan tujuan bahasa tersebut. Sejauh perempuan-perempuan dewasa begitu serius memburu keadilan, maka sejauh itu pula akan lahir paradigma-paradigma baru dari rahim pendidikan yang terus membudayakan tradisi ketidakadilan gender pada generasi-generasi sesudahnya melalui bahasa. Lalu, di mana letak idealisme pendidikan sebagai media memanusiakan manusia? Masih mungkinkah kita membela pendidikan sebagai satu-satunya jawaban menghapus ketidakadilan gender selama ini? Bukankah pendidikan telah mengatasnamakan dirinya sebagai lembaga paling berkuasa untuk membumikan tradisi masyarakat yang bias gender?

#### **IV. Pendidikan Berperspektif Gender: Mencari Jejak Humanisasi**

Bahasa patriarkal yang menjadi penyebab utama tumbuhnya ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan sebenarnya harus dilawan dengan usaha memasyarakatkan bahasa yang ramah gender. Artinya, jika bahasa menjadi sindroma akut tiadanya kesetaraan gender dalam ranah pendidikan, maka bahasa pula yang harus dijadikan sandaran teoritis untuk menaklukkan ketidakadilan tersebut. Hal ini disadari karena bahasa merupakan realitas konkrit yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan umat manusia secara umum. Setiap orang mungkin mempunyai pandangan berbeda tentang potensi dan kemampuan manusia yang hal ini

tentu saja dipengaruhi oleh sudut pandang yang dipergunakan. Namun, menurut Maslow, kebanyakan orang memiliki kemampuan untuk bersikap kreatif, spontan, penuh perhatian pada orang lain, penuh rasa ingin tahu, kemampuan untuk berkembang secara terus menerus, kemampuan mencintai dan dicintai serta ciri lain yang terdapat pada orang-orang yang mengaktualisasikan diri.<sup>14</sup>

Kemampuan lain yang terdapat pada manusia adalah kemampuan atau lebih tepatnya kecakapan retorik yang berfungsi sebagai penyelaras dan penyeimbang potensi-potensi lainnya.<sup>15</sup> Kecakapan retorik tersebut tentunya sangat berkaitan dengan bahasa yang di dalamnya terjelma suatu kebudayaan, gagasan, atau pola pikir manusia yang menyejarah. Manusia berpikir, berbicara, menulis, memahami dan melakukan interpretasi melalui bahasa.<sup>16</sup> Manusia pada akhirnya mengembangkan diri dalam dan dengan bahasa. Sejak lahir, manusia telah diajari untuk mengucapkan bahasa-bahasa oleh orang tua. Memang, pada awalnya anak-anak tidak dapat berbicara, tapi karena ia mempunyai potensi untuk berbicara, dan potensi tersebut mendapat stimulus yang cukup dari orang tua atau lingkungannya, maka ia sedikit demi sedikit berkembang menjadi manusia yang dapat berbicara. Di sini, bahasa selain berfungsi sebagai *gizmo* komunikasi, ia juga berfungsi sebagai instrumen pengembangan potensi manusia. Dengan demikian bahasa menjadi instrumen fundamental dalam soal pembangunan kebudayaan manusia dan kemanusiaan: *language as essence of humanity*.<sup>17</sup>

---

bahasa Arab (1.495 kata), Inggris (1.610 kata), Sanskerta-Jawa Kuna (677 kata), Cina (290), Portugis (131 kata), Tamil (83 kata), Parsi (63 kata), dan Hindi (7 kata). Lih. Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

<sup>14</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 96

<sup>15</sup> Lee C Deighton (ed), *The Encyclopedia of Education* (USA: Macmillan Company and Free Press, Vol. 4. 1971), 519.

<sup>16</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 26

<sup>17</sup> Torsten Husš dan T Neville Postleth Waite, *The International Encyclopedia of Education* (Tokyo: Pergamon, 1994), 2693

Penjelasan mengenai bahasa ini setidaknya mengawali upaya redefinisi paradigma gender melalui bahasa dalam dunia pendidikan. Bahasa tidak selamanya menjadi sebab terkalahkannya perempuan dalam kehidupan sosial, tapi juga menjadi *starting point* menumbuhkan keadilan dalam konteks kemanusiaan. Maka dari itu, untuk membendung bias-bias gender, lembaga pendidikan terlebih dahulu harus menengok kembali konsep pembelajaran yang selama ini dikembangkan. Utamanya dalam masalah bahasa sebagai media paling strategis menumbuhkan tradisi keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini tentunya tidak hanya dimulai dari pendidikan formal, melainkan juga harus diawali dari pengasuhan dalam lingkungan keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengalahkan dominasi bahasa patriarkal, maka seseorang juga harus menggunakan bahasa sebagai alternatif tandingan.

Dengan demikian, untuk membongkar bahasa ayah (bahasa patriarkal) juga harus dimulai dari pengenalan bahasa dan identitas ibu. Julia Kristeva adalah salah seorang pemerhati feminisme yang memakai konsep *maternity* untuk menggambarkan upaya bandingan ini. Kristeva menggunakan istilah *maternity* sebagai jembatan keberlangsungan identitas ibu, lebih tepatnya kaum wanita, dalam kehidupan sosial. Identitas seorang ibu, kata Kristeva, adalah hal yang paling penting dalam proses subjek dan kesadaran. Tubuh ibu menjamin keberlangsungan kehidupan spesies. Ketika seorang ibu kehilangan identitasnya anak tidak akan pernah ada. Identitas anak ini akan muncul justru ketika si ibu sadar akan identitasnya sendiri. Begitu juga, ketika seorang ibu dimarginalkan sedemikian rupa, maka anak perempuannya juga akan turut mengikuti kenyataan tersebut. Di dunia yang banal dan penuh dengan eksploitasi dan pelecehan seksual, seorang ibu sangat berperan penting dalam membentuk karakteristik anak, terutama membentuk karakteristik budaya dan tradisi masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, pembentukan tradisi tersebut seringkali dimulai dari karakter seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Seorang ibu seharusnya telah mengenalkan identitas perempuan beserta hak-haknya yang selama ini terkungkung dalam roda kehidupan, agar sang anak tumbuh bebas dari berbagai eksploitasi serta mampu menyuarakan

keadilan yang sebenarnya. Demikian pula dalam hal memutuskan berbagai persoalan keluarga, seorang anak harus dituntut untuk tidak selalu mengikuti tradisi ócpa kata ayah.<sup>18</sup>

Begitulah konsep *maternity*-nya Kristeva yang dapat dijadikan insiatif bagi lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan harus memulai langkahnya dengan membumikan bahasa ibu setara dengan bahasa ayah agar budaya patriarki dapat dikikis secara berkesinambungan. Kurikulum pendidikan seharusnya mengarah pada pembelajaran yang ramah gender. Hal ini tentunya tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan saja, tapi juga campur tangan pemerintah terutama Depdiknas diperlukan untuk menumbuhkan iklim pembelajaran berperspektif gender. Beberapa langkah yang semestinya dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah: *pertama*, merevisi bahasa buku teks yang bias gender. *Kedua*, memberikan keluasan kepada perempuan untuk menyuarakan perbedaan. *Ketiga*, meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jurusan atau program keahlian di semua jenjang pendidikan, khususnya untuk program-program keahlian atau jurusan yang bias laki-laki, melalui perbaikan dalam sistem penerimaan siswa/mahasiswa baru dan penjurusan, sehingga dapat menyeimbangkan proporsi siswa/mahasiswa menurut gender. *Keempat*, mewacanakan paradigma keadilan gender dalam setiap materi pelajaran di semua jenjang pendidikan serta memberikan kesadaran penuh terhadap peserta didik tentang ketidakadilan gender selama ini. *Kelima*, membentuk program ekstra secara periodik dengan menyediakan ruang terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin. *Keenam*, menyeimbangkan proporsi tenaga pengajar antara laki-laki dan perempuan dan memberikan keleluasaan kepada perempuan setara dengan laki-laki pada setiap pengambilan kebijakan lembaga pendidikan.

Maka, pendidikan berperspektif gender merupakan pendidikan yang menghargai kesetaraan dalam setiap proses pembelajarannya. Pendidikan semacam ini menggambarkan adanya etika kesetaraan yang selama ini

---

<sup>18</sup> Lihat selengkapnya dalam buku Julia Kristeva, "Stabat Mater," dalam Diana Tietjens Meyer (ed.), *Feminist Social Thought*, (New York: Routledge, 1997), 300



diimpikan oleh perempuan sebagai wujud dari hak dan kebebasannya. Model pendidikan ini tentunya selalu meletakkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, baik dalam ranah sistem maupun metode pembelajaran. Perempuan, dalam hal ini, akan benar-benar merasakan suasana kesetaraan yang selama ini diperjuangkan.

Namun, sebuah konsep kesetaraan selalu menyisakan perjuangan yang melelahkan. Keenam langkah tersebut belum cukup sistematis untuk membendung tradisi ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam dunia pendidikan. Hanya berbekal transformasi tanpa mengubah identitas pendidikan selama ini tidak akan mewujudkan kebebasan atas nama kemanusiaan. Pendidikan harus berusaha melibatkan konsep kemanusiaan (humanisme) agar ketidakadilan gender benar-benar hilang dalam lembaga pendidikan. Konsep kemanusiaan dalam lembaga pendidikan ini ingin menjadikan manusia sebagai subjek, dan bukan objek. Manusia utuh, kata Freire, adalah manusia subjek yang selalu memiliki dirinya sendiri.<sup>19</sup>

Dengan demikian, pendidikan seharusnya juga memfokuskan diri pada proses pemanusiaan manusia (humanisasi). Untuk itu diperlukan sebuah pemberdayaan atau *empowerment* terhadap peserta didik dalam lembaga pendidikan. Untuk membentuk strategi paradigmatis tentang proses humanisasi dalam lembaga pendidikan serta hubungannya dengan persoalan gender ini, penulis merujuk pada Sastrapratedja yang menyatakan bahwa istilah *empowerment* sangat terkait erat dengan pengertian *power*, yaitu kekuatan atau keberdayaan. Dalam istilah *empowerment*, *power* mengandung arti sebagai (1) daya untuk berbuat (*power-to*); (2)

---

<sup>19</sup> Manusia semacam ini, kata Freire, secara kodrati memiliki arti bahwa manusia berhak untuk mengatur, membangun, dan mengarahkan destininya sendiri. Lih. Paulo Freire, *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984), 4. Secara *de jure*, destini manusia memang sudah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan, tetapi secara *de facto* ia memerlukan intervensi bahkan interferensi manusia. Karena destini yang ada secara potensial itu tidak secara *an sich* menjadi aktual tanpa ada upaya nyata dari manusia itu sendiri untuk mengaktualisasikannya. Kalau destini potensial itu dalam dirinya sendiri pasti dapat menjadi aktual, lalu apa makna Tuhan memberikan potensi kepada manusia? Bukankah potensi itu pada dasarnya adalah untuk ditumbuhkembangkan melalui *cultural struggle* manusia secara terus menerus, baik secara individual maupun sosial? *Cultural struggle* itu tidak lain adalah pendidikan.

kekuatan bersama (*power-with*); (3) kekuatan dari dalam (*power-within*). Pendidikan yang berlandaskan kemanusiaan, lebih tepatnya pendidikan humaniora, ingin membangun ketiga kekuatan tersebut secara selaras dan seimbang dalam diri individu.<sup>20</sup>

*Power-to* adalah kekuatan kreatif yang merupakan dimensi individual dari pemberdayaan yang membuat seseorang (anak didik) mampu melakukan sesuatu. Kemampuan melakukan sesuatu telah menandakan anak diri telah mengalami perkembangan signifikan. Kematangan pribadinya muncul yang pada akhirnya mengarah pada kemandirian dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, membangun berbagai keterampilan dan pengetahuan. Hal itu dapat dicapai apabila aspek individual yang berupa kreativitas anak didik itu bukan saja diakui, tetapi dihargai dan dimuliakan dengan cara menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif dan responsif.

Dalam masalah gender, kreativitas ini lebih banyak ditampakkan oleh laki-laki walaupun secara kognitif perempuan mempunyai keulatan dan talenta yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun, karena perempuan tidak mempunyai kepercayaan diri yang besar sebagaimana laki-laki akibat

deraturan-peraturan yang mengekangkannya, mereka sering merasa kurang kreatif dibanding laki-laki. Akibatnya, perempuan cenderung lebih inferior, tidak percaya diri, dan bahkan selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Tipe pendirian semacam ini tentunya akan mudah dipengaruhi dan dipermainkan oleh orang lain karena tidak mempunyai sikap kemandirian yang tegas. Untuk itu, *power-to* harus benar-benar menjadi dasar utama pengembangan kepribadian (*personality*) anak didik di lembaga pendidikan agar laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka masing-masing.

Namun, agar pembangunan *power-to* tidak mengarah pada sikap individualistik yang terlampaui eksekutif, maka harus diikuti dengan pengem-

---

<sup>20</sup> M. Sastrapratedja SJ, *Pendidikan sebagai Humanisasi*, (Yogyakarta: USD, 2001), 11-13

bangun *power-with*, yaitu membantu anak didik membangun solidaritas. Ini dapat dicapai melalui penyemaian nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam diri anak didik. Rasa cinta kasih merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang paling luhur yang dimiliki oleh setiap orang.<sup>21</sup> Cinta kasih membuat seseorang peka terhadap kebutuhan orang lain (*sense of crisis*). Dengan cinta kasih seseorang dapat menebarkan rasa empati dan simpati kepada orang lain. Dengan cinta kasih seseorang dapat menyatukan diri dengan dengan orang lain (*sense of belonging*). Dan dengan cinta kasih pula seseorang dapat menjadi manusia utuh dan integral, atau semacam *personal integration*.<sup>22</sup>

Hubungannya dengan persoalan gender, pengembangan *power-with* ini akan menjadikan anak didik dapat menghargai perbedaan. Anak didik akan dilatih untuk meningkatkan sensibilitasnya kepada sesama agar dapat tercipta rasa keterpanggilan untuk saling menghormati dan menghargai martabat kemanusiaan secara universal. Lebih tepatnya, *power-with* ini akan membantu anak didik menghargai perbedaan jenis kelamin sehingga juga mampu menghargai perbedaan profesi dan lapangan kerja antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada eksploitasi dan diskriminasi karena mereka telah diajari tentang solidaritas dan saling menghargai antar sesama sebagai wujud dari rasa kemanusiaan.

Kekuatan solidaritas itu tidak datang dari luar (*outside in*), tetapi tumbuh dari dalam (*inside out*), yaitu lewat impuls-impuls kekuatan spiritual dan etika diri (*power-within*) dalam diri setiap manusia. *Power-within* ini biasanya tumbuh melalui pengasahan nilai-nilai religius yang bersumber dari agama. Kekuatan ini juga akan membantu anak didik melakukan kontemplasi sosial terhadap berbagai macam masifikasi umat

---

<sup>21</sup> Paulo Freire menyatakan, sebagaimana disitir oleh Denis Collins, bahwa manusia itu memiliki panggilan ontologis. Panggilan inilah yang berusaha menjadikan manusia menjadi semakin manusiawi dengan rasa cinta kasih tersebut. Lih. Dennis Collins, *Paulo Freire: Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Komunitas APIRU Yogyakarta, 1999), 85

<sup>22</sup> Lih. John P. Miller, *Humanizing of the Classroom: Models of Teaching in Affective Education*, (New York: Preager Publishers, 1976), 5

manusia. Dalam hal ini, agama menjadi medium yang berpengaruh terhadap peningkatan *power-within* tersebut. Ini sinkron sekali dengan inklinasi kodrati manusia untuk beragama.

Kaitannya dengan isu gender dalam dunia pendidikan, anak didik seharusnya ditanamkan nilai-nilai religius untuk memelihara kesinambungan transendensi antarumat manusia. Dengan nilai-nilai religiusitas inilah anak didik akan diajari untuk bersikap lebih manusiawi, lebih dari sekadar mengerti perbedaan, tapi juga menerapkan asas saling menghormati antarsesama tanpa ada eksploitasi dan diskriminasi. Dengan demikian, posisi perempuan bisa terangkat dengan adanya sikap manusiawi ini, karena di situ harga diri manusia (utamanya perempuan) dibangun, harkat dan martabatnya dijunjung tinggi serta nilai-nilai yang memancar dari martabat itu dihargai dan dimuliakan.

Kenyataan inilah yang penulis sebut sebagai etika pendidikan kesetaraan, di mana pendidikan tidak hanya berurusan langsung dengan metode pembelajaran *an-sich*, tapi juga berusaha melihat kembali posisi perempuan melalui sudut pandang nilai-nilai etika-moral dalam struktur pembelajarannya. Etika pendidikan kesetaraan ini lebih dari sekadar mengingatkan pola pembelajaran pendidikan yang selama ini bias gender, tapi juga berusaha untuk mengubah paradigma, identitas, dan bahkan idealisme pendidikan tersebut untuk segera menghapus tindak ketidakadilan gender yang telah lama dipupuk dalam tubuh lembaga-lembaga pendidikan. Etika pendidikan yang dimaksud tentunya dengan diiringi perubahan-perubahan pola pembelajaran yang menfokuskan diri pada tiga prinsip humanisasi yang tergabung dalam satu strategi: *empowerment* (pemberdayaan) terhadap peserta didik secara integral dan holistik.

#### IV. Kesimpulan

Berbagai anomali ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia sebenarnya akan mampu diminimalisasi jika pendidikan mau melakukan perubahan dan segera berbenah diri. Sejak gender dijadikan isu aktual di negara ini, pendidikan justru memperparah kondisi tersebut dengan upaya pemasyarakatan bahasa.

Pendidikan, dalam konteks ini, secara tidak langsung mempermainkan bahasa sejalan dengan tradisi masyarakat Indonesia. Akibatnya, bahasa selalu memojokkan perempuan dalam segala lini. Identitas pendidikan pada akhirnya tumbang karena tidak mampu berjalan sesuai dengan misi idealismenya: memanusiakan manusia (humanisasi). Buku-buku pelajaran yang digunakan di lembaga-lembaga pendidikan begitu serentak menyuarakan bias-bias gender kepada anak didik. Para guru pun mendidik dengan menggunakan bahasa yang tidak ramah gender. Dan akhirnya, pendidikan dinilai gagal mengilhami konsep kesetaraan bagi kaum perempuan.

Dalam prakteknya, ini memerlukan suatu sistem pembelajaran atau pendidikan yang kondusif yang memungkinkan mekarnya keadilan gender serta mampu mengembangkan sifat peserta didik yang ramah gender. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan langkah pembelajaran yang paradigmatis, egaliter, fleksibel, dan persuasif. Semacam pendidikan berprespektif gender yang berusaha merobohkan anggapan tentang posisi perempuan selama ini.

Namun demikian, cita-cita luhur pendidikan ini hanya akan menjadi nyata jika disatukan dengan suatu konsep pendidikan yang benar-benar melihat seluruh manusia (baik laki-laki dan perempuan) sebagai subjek. Konsep etika pendidikan kesetaraan mungkin tepat dijadikan sandaran teoritis aplikatif dalam menjawab persoalan dehumanisasi dalam dunia pendidikan tersebut. Tentunya, konsep tersebut ingin menyuguhkan pembelaan terhadap yang tertindas, yang tereksploitasi, yang teraniaya, yang selama ini banyak diperankan oleh kaum perempuan.

Etika pendidikan kesetaraan sebagaimana yang diungkap di depan tidak akan pernah berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak, terutama guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Profesionalisme, konsistensi, dan koeksistensi guru menjadi prasyarat mutlak untuk membebaskan perempuan dari paradigma ketidakadilan gender dalam wilayah pendidikan selama ini.

Akhirnya, *apologia pro libro suo*. Tak ada gading yang tak retak. Tulisan ini hanya sekadar hipotesis-hipotesis awal yang mewakili ke-

gelisahan penulis terhadap fenomena gender dalam dunia pendidikan. Tak ada yang lebih berharga kecuali membuka ruang untuk penelitian, penambahan, dan kritikan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berger and Luckmann. *The Social Construction of Reality*. London: Penguin Press BPS, 1976.
- Chafetz, J.S. "The Gender Division of Labor and The Reproduction of Female Disadvantage: Toward an Integrated Theory." dalam R.L. Blumberg (ed.). *Gender, Family, and Economy: The Triple Overlap*. Newbury Park: Sage Publication, 1991.
- Chiplin and Sloane. *Trackling Discrimination at the Workplace: an Analysis of Sex Discrimination in Britian*. London: Cambridge University Press, 1982.
- Collins, Dennis. *Paulo Freire: Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Komunitas APIRU Yogyakarta, 1999.
- Collins, R. "Women and Men in The Class Structure," dalam R.L. Blumberg (ed.). *Gender, Family, and Economy: The Triple Overlap*. Newbury Park: Sage Publication.
- Darmosoetopo, Riboet. *Ideologi Gender dalam Perubahan Sosial*. Makalah Simposium Internsional Ilmu-ilmu Humaniora di Yogyakarta. Makalah tidak dipublikasikan, 1998.
- Deighton, Lee C (ed). *The Encyclopedia of Education*. USA: Macmillan Company and Free Press. Vol. 4, 1971.
- Freire, Paulo. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Goble, Frank G. *Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Goddard, Angela dan Lindsey Mean Petterson. *Language and Gender*. London and New York: Routledge, 2000.
- Husš, Torsten dan T Neville Postleth Waite. *The International Encyclopedia of Education*. Tokyo: Pergamon, 1994.
- Kartodirjo, Suyatno. *Wanita dalam Kebudayaan Priyayi: Kajian Sejarah Gender*. Makalah Simposium Internasional Ilmu-ilmu Humaniora di Yogyakarta. Makalah tidak dipublikasikan, 1998.

- Kristeva, Julia. "Stabat Mater." dalam Diana Tietjens Meyer (ed.). *Feminist Social Thought*. New York: Routledge, 1997.
- Miller, John P. *Humanizing of the Classroom: Models of Teaching in Affective Education*. New York: Preager Publishers, 1976.
- Rapar, JH. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Sastrapratedja, M. *Pendidikan sebagai Humanisasi*. Yogyakarta: USD, 2001.
- Saussure, Ferdinand de. *Pengantar Linguistik Umum*. Penerjemah: Tim Penerjemah UGM Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Sumaryono, E. *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Supatra, Hendarto dan Mujid F. Amin. "Analisis Kontrastif Kata Lanang dan Wadon: Suatu Kajian Sosiosemantik untuk Mengungkap Status Wanita Jawa." dalam *Lembaran Sastra*. No. 20 tahun, 1996.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought*. Australia: Allen & Unwin, 1998.